



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

Telp. (0760) 561616 – 561621 Fax (0760) 561617
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 55/SK/BPKAD/2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memutar arahkan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun;
- c. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42867);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka (RPJN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 20. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.19.5-13.7 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 21. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 22. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kelola Organisasi Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Buapti Nomor 24 tahun 2024 tentang RKPD tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. Sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 15 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi 2021–2026, dan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memuat hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, tujuan dan sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini.

Teluk Kuantan, 15 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	30
2.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
4.1 Rencana Kerja.....	42
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	46
BAB V : PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.....	9
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD Merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi,

harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Merupakan pedoman bagi dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026, Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42867);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka (RPJN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
20. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.19.5-13.7 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
22. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kelola Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2024 tentang RKPD tahun 2025

1. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun maksud penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, pengawsan dan pelaporan keuangan dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Singingi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi adalah;

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025.
- d. Memberi Arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
- e. Mewujudkan visi dan misi BPKAD dalam memberikan pelayanan publik optimal dan prima.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Perencanaan Renja OPD
- 2.2. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuantan Singingi memuat review hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 serta Rencana Program dan Kegiatan tahun 2025. Penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2023.

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.342.857.349,00- (*Dua Ratus Delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang tertuang dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan. Untuk realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 282.669.828.865,00- (*Dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*). Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD pada anggaran tahun 2023 tingkat capaian kinerja dan capaian keuangannya sebesar 99,06 % (dapat dilihat pada tabel 2.1).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaksanakan Tabel 2.2 (Lampiran 1) .

Capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 yang terdiri dari 3

(tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja yang hendak dicapai meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrument penilaian. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.

Dimana anggaran sebesar sebesar Rp. 285.485.083.749,00- (*Dua Ratus Delapan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan serapan realisasi anggaran sebesar 99,01 % atau sebesar Rp. 282.660.304.865,00- (*Dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*). Sedangkan untuk capaian kinerjanya kegiatan dan sub kegiatan sebahagian besar sudah mencapai hampir 100%.

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			REALISASI SPJ (RP)	(%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.226.538.392,00	13.696.024.674,00		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.143.750,00	16.141.000,00	99,98	99,98
1	5.02.5.02.0.001.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.762.500,00	10.762.500,00	100	100
2	5.02.5.02.0.001.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.381.250,00	5.378.500,00	99,95	99,95
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.662.147.747,00	10.449.728.061,00	98,48	98,48
3	5.02.5.02.0.001.2.02.01	10.662.147.747,00	10.499.728.061,00	98,48	98,48

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

III	Administrasi Kepegawaian	485.458.000,00	373.022.520,00	76,84	76,84
	Perangkat Daerah				
4	5.02.5.02.0.001.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	485.458.000,00	373.022.520,00	76,84	76,84
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.184.500,00	879.416.880,00	92,16	92,16
5	5.02.5.02.0.001.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	6.133.000,00	58,41	58,41
6	5.02.5.02.0.001.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.545.000,00	103.072.000,00	73,34	73,34
7	5.02.5.02.0.001.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.699.500,00	33.970.000,00	77,74	77,74
8	5.02.5.02.0.001.2.06.06	11.800.000,00	2.700.000,00	22,88	22,88

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
9	5.02.5.02.0.001.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	747.640.000,00	733.541.880,00	98,11	98,11
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688.026.000,00	672.608.250,00	97,76	97,76
11	5.02.5.02.0.001.2.07.001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.000.000,00	548.340.000,00	97,74	97,74
12	5.02.5.02.0.001.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.322.000,00	63.710.250,00	97,53	97,53
13	5.02.5.02.0.001.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.704.000,00	60.558.000,00	98,14	98,14
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.262.445,00	726.862.416,00	85,99	85,99
12	5.02.5.02.0.001.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.598.700,00	20.900.000,00	55,59	55,59
13	5.02.5.02.0.001.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	807.663.745,00	705.962.416,00	87,41	87,41

	Kantor				
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.315.950,00	528.245.547,00	91,82	91,82
14	5.02.5.02.0.001.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.467.900,00	41.353.908,00	99,73	99,73
15	5.02.5.02.0.001.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.272.650,00	207.002.363,00	94,40	94,40
16	5.02.5.02.0.001.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	264.493.500,00	257.549.276,00	97,37	95,10
17	5.02.5.02.0.001.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.081.900,00	22.340.000,00	44,61	44,61
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	294.999.300.687,00	252.610.185.401,00	85,63	85,63

I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.411.884.500,00	1.389.354.126,00	98,40	98,40
18	5.02.5.02.0.002.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	45.052.000,00	44.603.500,00	99,00	99,00
19	5.02.5.02.0.002.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	23.367.500,00	23.147.500,00	99,06	99,06
20	5.02.5.02.0.002.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	22.374.000,00	20.035.600,00	89,55	89,55
21	5.02.5.02.0.002.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.971.000,00	36.852.000,00	99,68	99,68
22	5.02.5.02.0.002.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	609.097.000,00	598.989.000,00	98,34	98,34
23	5.02.5.02.0.002.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	102.995.000,00	100.830.940,00	97,90	97,90

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran APBD				
24	5.02.5.02.0.002.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	255.942.000,00	253.418.340,00	99,01	99,01
25	5.02.5.02.0.002.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	101.871.000,00	100.679.758,00	98,83	98,83
26	5.02.5.02.0.002.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	179.015.000,00	176.612.488,00	98,66	98,66
27	5.02.5.02.0.002.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	35.200.000,00	34.185.000,00	0,00	0,00
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	682.750.746,00	660.807.433,00	96,79	96,79
28	5.02.5.02.0.002.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	77.423.596,00	77.180.574,00	99,69	99,69
29	5.02.5.02.0.002.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42.794.107,00	41.057.334,00	77,48	77,48

30	5.02.5.02.0.002.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	32.743.722,00	21.019.190,00	64,19	64,19
31	5.02.5.02.0.002.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.087.462,00	25.689.300,00	98,47	98,47
32	5.02.5.02.0.002.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	47.123.714,00	46.795.999,00	99,30	99,30
34	5.02.5.02.0.002.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	456.578.145,00	449.065.036,00	98,35	98,35

III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	854.746.240,00	841.859.066,00	98,49	98,49
35	5.02.5.02.0.002.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95.524.800,00	95.180.622,00	99,64	99,64
36	5.02.5.02.0.002.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	461.816.000,00	459.461.300,00	99,49	99,49
37	5.02.5.02.0.002.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	85.483.640,00	85.060.244,00	99,50	99,50
	5.02.5.02.0.002.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	35.051.800,00	25.552.900,00	72,90	72,90

	Operasional	Penyelenggaraan				
	Akuntansi Pemerintahan Daerah					
38	5.02.5.02.0.002.2.03.11		176.870.000,00	176.604.000,00	99,85	99,85
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		291.599.919.201,00	249.276.250.476,00	85,49	85,49
39	5.02.5.02.0.002.2.04.08		278.359.468.901,00	249.096.769.792,00	89,49	89,49
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
40	5.02.5.02.0.002.2.04.09		13.240.450.300,00	179.480.684,00	1,36	1,36
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
V	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		450.000.000,00	441.914.300,00	98,20	98,20
41	5.02.5.02.0.002.2.05.02		450.000.000,00	441.914.300,00	98,20	98,49
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah					
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		687.608.000,00	679.257.080,00	98,79	98,79

I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	687.608.000,00	679.257.080,00	98,79	98,79
	Pengelolaan Keuangan Daerah				
43	5.02.5.02.0.003.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	32.322.000,00	31.946.500,00	98,84	98,84
45	5.02.5.02.0.003.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.025.200,00	49.798.600,00	99,55	99,55
46	5.02.5.02.0.003.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	160.982.890,00	157.478.520,00	97,82	97,82
47	5.02.5.02.0.003.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	37.162.500,00	36.589.900,00	98,46	98,46
48	5.02.5.02.0.003.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	53.148.240,00	53.013.70000	99,75	99,75
49	5.02.5.02.0.003.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	43.996.740,00	43.088.300,00	97,94	97,94
50	5.02.5.02.0.003.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	41.532.900,00	40.485.700,00	97,48	97,48
51	5.02.5.02.0.003.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	121.812.800,00	120.539.700,00	97,48	97,48

	Daerah				
52	5.02.5.02.0.003.2.01.13	146.624.730,00	146.316.160,00	99,79	99,79
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik				
	Daerah Pemerintah Kab.Kota				
	JUMLAH	309.913.447.079,00	266.985.467.155,00	86,15	86,15

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Bulan Desember Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	REALISASI	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	5.02.5.02.0.001.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
2	5.02.5.02.0.001.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	5.02.5.02.0.001.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 Orang	60 Orang	80%
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

4	5.02.5.02.0.001.2.05.02	Jumlah paket pakaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	75 paket	150 jenis	200%
5	5.02.5.02.0.001.2.05.09	Jumlah pemeliharaan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75 orang	75 orang	100%
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6	5.02.5.02.0.001.2.06.01	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen instalasi listrik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	100%
7	5.02.5.02.0.001.2.06.04	Tersedianya bahan logistik Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1500 paket	1500 paket	100%
8	5.02.5.02.0.001.2.06.05	Jumlah Barang Cetak dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	177.192	177.192	100%
9	5.02.5.02.0.001.2.06.06	Jumlah Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 dokumen	2 dokumen	100%
10	5.02.5.02.0.001.2.06.09	Jumlah koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302 laporan	302 laporan	100%
V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
11	5.02.5.02.0.001.2.07.10	Jumlah Sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 unit	2 unit	25%

atau Bangunan Lainnya

**VI Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

12	5.02.5.02.0.001.2.08.01	Jumlah surat menyurat	3775 surat	2518 surat	66,70 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
13	5.02.5.02.0.001.2.08.04	Jumlah jasa tenaga administrasi pelayanan umum	34 orang	41 orang	120,59 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

**VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

14	5.02.5.02.0.001.2.09.01	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
15	5.02.5.02.0.001.2.09.02	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
16	5.02.5.02.0.001.2.09.09	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
17	5.02.5.02.0.001.2.09.10	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101 unit	101 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

**B PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**I Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah**

18	5.02.5.02.0.002.2.01.01	Jumlah dokumen KUA Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
19	5.02.5.02.0.002.2.01.02	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	-	-
20	5.02.5.02.0.002.2.01.05	Jumlah dokumen DPA- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	44 dokumen	44 dokumen	100%
21	5.02.5.02.0.002.2.01.06	Jumlah dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	44 dokumen	44 dokumen	100%
22	5.02.5.02.0.002.2.01.07	Jumlah dokumen perda Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	100%
23	5.02.5.02.0.002.2.01.08	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	100%
24	5.02.5.02.0.002.2.01.09	Jumlah dokumen	2	2 dokumen	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen		
25	5.02.5.02.0.002.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
26	5.02.5.02.0.002.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
27	5.02.5.02.0.002.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6 dokumen	0	-
II Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
28	5.02.5.02.0.002.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50 dokumen	50 dokumen	100%
29	5.02.5.02.0.002.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen penerbitan anggaran kas dan SPD	650 dokumen	528 dokumen	81,23 %
30	5.02.5.02.0.002.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	25 dokumen	25 dokumen	100%
31	5.02.5.02.0.002.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	286 dokumen	286 dokumen	100%

	Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
32	5.02.5.02.0.002.2.02.09	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	286 dokumen	286 dokumen	100%
33	5.02.5.02.0.002.2.02.10	Jumlah Petunjuk Teknis Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5000 dokumen	7540 dokumen	150,80 %
34	5.02.5.02.0.002.2.02.11	Jumlah peserta yang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 dokumen	150 dokumen	100%
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
35	5.02.5.02.0.002.2.03.03	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17 laporan	17 laporan	100%

	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
36	5.02.5.02.0.002.2.03.04	Jumlah Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
37	5.02.5.02.0.002.2.03.05	Jumlah Rancangan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
38	5.02.5.02.0.002.2.03.11	Jumlah orang/peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	100%
IV Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
39	5.02.5.02.0.002.2.04.08	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	218 laporan	218 laporan	100%
40	5.02.5.02.0.002.2.04.09	Jumlah laporan penggunaan dana darurat	10 laporan	2 OPD	20%

Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak
dan Mendesak

V Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

41	5.02.5.02.0.002.2.05.02	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
42	5.02.5.02.0.002.2.05.03	Jumlah orang yang Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	75 orang	75 orang	100%

C PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**I Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah**

43	5.02.5.02.0.003.2.01.01	Jumlah dokumen standar Penyusunan Standar Harga	2 dokumen	2 dokumen	100%
44	5.02.5.02.0.003.2.01.02	Jumlah standar harga Penyusunan Standar Harga Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
45	5.02.5.02.0.003.2.01.03	Jumlah Perencanaan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	4 dokumen	4 dokumen	100%

	Kebutuhan Barang Milik Daerah				
46	5.02.5.02.0.003.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
47	5.02.5.02.0.003.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
48	5.02.5.02.0.003.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
49	5.02.5.02.0.003.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
50	5.02.5.02.0.003.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	1 laporan	1 laporan	100%
51	5.02.5.02.0.003.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
52	5.02.5.02.0.003.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab.Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab.Kota	1 orang	15 orang	1500%

JUMLAH

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Bulan Desember Tahun Anggaran 2023

- **Faktor-faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi selaku Koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal.

- **Terhadap Implikasi yang timbul dari target capaian program/kegiatan**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi keuangan telah mencapai sebesar 98,4 % berarti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan secara efisien dalam penganggaran.

Secara kualitas pencapaian sasaran srategis telah sesuai dengan dtetapkan, walaupun masih ada ha-hal lainnya yang masih menjadi kendala, antara lain dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Dimana Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Sistem/mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD.

Terkait dengan aset daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Maka harus dilakukan penyajian kembali/restatement atas aset daerah dalam neraca antara lain:

1. Persediaan.
2. Aset tetap, disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan
3. Aset tetap tidak berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja Program/Kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Melakukan pembinaan melalui asistensi di Anggaran, Penatausahaan dan Aset.
3. Melakukan Bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pelatihan.
4. Setiap Sub Bidang membuat Rencana Anggaran Kegiatan sehingga anggaran kegiatan yang terdapat di DPA terserap semua baik keuangan maupun kinerja karena sudah direncanakan secara proporsional.
5. Saat penyusunan Renja Tahunan, RKA dan DPA mengacu kepada Renstra yang ada sehingga penyerapan kinerja dapat tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah

berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- **Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program.**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Berdasarkan visi Bupati Kuantan Singingi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam melaksanakan Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”**. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
6. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana

prasarana yang tersedia

7. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
8. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
9. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
10. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah Rencana Tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jajaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan review yang telah dilakukan, tidak ada terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dengan hasil analisa Kebutuhan sesuai dengan Perbub Rancangan akhir RKPD tahun 2024 berikut ini (Tabel 2.3 lampiran 2).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah ” **Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis**”. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Maka sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya tata kelola keuangan yang berkualitas dan akuntabel, serta Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya, dimana capaian indikator kinerja tujuan merupakan capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026. Adapun tujuan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel 3.1 Berikut ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Lama Waktu Penyelenggaraan penatausahaan Keuangan	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	70	75	80	80	80

Sumber: Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan bahan logistik kantor
3. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan sarana dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
6. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
8. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
9. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
10. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
11. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
12. Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
2. Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
3. Penatausahaan pembiayaan daerah

4. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
5. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
6. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
7. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
8. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
9. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah

1. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
2. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
4. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
5. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

6. Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
2. Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota

03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan standar harga
1. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
2. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
3. Penatausahaan barang milik daerah
4. Pengamanan barang milik daerah
5. Penilaian barang milik daerah
6. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
7. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
9. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Rencana kerja program dan kegiatan disusun berdasarkan tupoksi masing-masing bidang dan sub bidang pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2024, adalah sebagai berikut:

01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2 Penyediaan bahan logistik kantor
- 3 Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Pengadaan sarana dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 3 Penyediaan jasa surat menyurat
- 4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1 Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- 2 Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- 4 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
- 5 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- 6 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- 7 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- 8 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- 9 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran

- 10 Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
- 11 Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
- 12 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- 2 Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
- 3 Penatausahaan pembiayaan daerah
- 4 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
- 5 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
- 6 Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
- 7 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- 8 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
- 9 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah

- 1 Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
- 2 Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah

- 3 Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
- 4 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- 5 Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
- 6 Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1 Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- 2 Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- 1 Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah
- 2 Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota

03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1 Penyusunan standar harga
- 2 Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
- 3 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- 4 Penatausahaan barang milik daerah
- 5 Pengamanan barang milik daerah
- 6 Penilaian barang milik daerah
- 7 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
- 8 Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah

9 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah

10 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya organisasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

5.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 330.008.865.400,- (*Tiga ratus tiga puluh milyar delapan juta delapan ratus enam puluh lima empat ratus rupiah*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 mengarahkan program dan kegiatan yang strategis dalam penyusunan APBD tahun 2025 berdasarkan fungsi dan urusan pemerintah daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2022 – 2026.

5.2 Saran

Untuk itu diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mampu menunjukkan/memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas rencana strategis yang ingin dicapai. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

Segecap Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengharapka agar Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 dapat memberikan informasi kepada stakeholders dalam pengambilan keputusan sekaligus untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Teluk Kuantan, 15 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode							Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan				
							Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	0						KEUANGAN				330.008.895.400					352.576.494.236
5	0	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.385.864.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.392.542.980
5	0	0	2	0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.547.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.547.300
5	0	0	2	0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	9.031.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	9.031.550

5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	4 Laporan	7.515.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	4 Laporan	7.515.750
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.943.249.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.849.605.280
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah ASN	65 ASN	11.933.249.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah ASN	65 ASN	8.839.605.280
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000
5	02	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	16 laporan	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Laporan	16 laporan	5.000.000
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				751.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				751.000.000
5	02	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	0	0

								kelengkap an					kelengkap an		
5	0 2	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang Mengikuti	75 ASN	751.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang Mengikuti	75 ASN	751.000.000
5	0 2	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.013.845.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.013.845.400
5	0 2	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Kompone n	7 jenis	11.553.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Kompone n	7 jenis	11.553.900
5	0 2	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis ATK yang disediaka n, Jumlah Porsi	1500 paket	145.197.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis ATK yang disediaka n, Jumlah Porsi	1500 paket	145.197.000
5	0 2	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Barang Penggandaan	177192 lembar	85.810.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Barang Penggandaan	177192 lembar	85.810.000
5	0 2	0 1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 dokum en	12.498.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah dokumen	2 dokum en	12.498.500

5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	302 laporan	758.786.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan	302 laporan	758.786.000
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				223.609.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				271.007.100
5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	223.609.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 unit	271.007.100
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.010.706.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				910.782.250
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Surat Yang Terkirim	3775 Surat	25.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Surat Yang Terkirim	3775 Surat	25.200.000
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan	Jumlah laporan	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan	Jumlah laporan	12 laporan	8.676.000

							Tengah, Sungaijering					Tengah, Sungaijering			
5	0 2	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah laporan	34 laporan	985.506.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah laporan	34 laporan	876.906.250
5	0 2	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				426.907.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				579.755.650
5	0 2	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Jabatan	1 Unit	42.504.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Jabatan	1 Unit	42.504.600
5	0 2	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Operasional	7 Unit	234.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Mobil Operasional	7 Unit	302.040.000
5	0 2	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Unit	1 unit	66.105.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering	Jumlah Unit	1 unit	151.834.500
5	0 2	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	101 unit	83.376.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuantan Singingi, Kuantan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	101 unit	83.376.550

							Tengah, Sungaijering					Tengah, Sungaijering			
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				313.637.140 .300	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				338.548.019 .156
5	02	02	2			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.055.726.6 00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.505.726.6 00
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokum en	47.333.100	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokum en	47.333.100
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokum en	41.772.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokum en	41.772.000
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	0	0
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	0	0

5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA SKPD	84 DPA SKPD	23.507.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA SKPD	84 DPA SKPD	39.096.000
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA-P SKPD	84 DPA SKPD	38.843.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DKA-P SKPD	84 DPA SKPD	100.077.000
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1.121.614.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	1.172.904.500
5	02	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	160.885.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	237.795.000
5	02	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	113.015.500	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	284.757.500
5	02	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	53.222.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	53.222.000

5	02	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	203.837.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 dokumen	277.072.500
5	02	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	0	0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Frekuensi	0	0
					13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 orang	251.697.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 orang	251.697.000
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				803.485.550	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.253.485.550
5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	12 dokumen	83.844.300	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	12 dokumen	83.844.300
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	528 dokumen	75.872.400	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	528 dokumen	75.872.400

5	02	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 dokumen	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 dokumen	0
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	25 dokumen	33.562.300	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	25 dokumen	33.562.300
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 dokumen	64.324.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	8 dokumen	64.324.000
5	02	02	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah STS	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah STS	0	0
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5500 dokumen	48.301.800	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5500 dokumen	48.301.800

5	02	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	0	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	0	0
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	150 orang	497.580.750	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	150 orang	947.580.750
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.109.708.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.375.428.000
5	02	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	4 laporan	114.225.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	4 laporan	114.225.500
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	7 laporan	511.583.500	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	7 laporan	511.583.500

5	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	111.399.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	111.399.500
5	02	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	0	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	0	0
5	02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk di tanyakan ke kapid akutansi dulu		0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk di tanyakan ke kapid akutansi dulu	0	0
5	02	02	2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	150 Orang	253.239.500	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	150 Orang	518.959.500
					12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga	26 lembaga	119.260.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga	26 lembaga	119.260.000
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				308.974.766.600	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				332.719.925.456

5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	218 laporan	302.741.933.800	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	218 laporan	326.487.092.656
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10 Laporan	6.232.832.800	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10 Laporan	6.232.832.800
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				693.453.550	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				693.453.550
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	1 dokumen	472.781.250	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	1 dokumen	472.781.250
5	02	02	2	05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	100 Orang	220.672.300	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	100 Orang	220.672.300
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				985.891.100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.635.932.100
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				985.891.100	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.635.932.100

5	02	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	57.250.000	Penyusunan Standar Harga	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	57.250.000
5	02	03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0
5	02	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	52.350.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	52.350.100
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	220.242.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	220.242.000
5	02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	351.000.000
5	02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100.000.000

5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	52.750.100	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	52.750.100
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	111.453.500	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	211.453.500
5	02	03	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	195.220.170	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 laporan	195.220.170
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang	50 Orang	146.625.230	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang	50 Orang	395.666.230

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra BPKAD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2025	4Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd/ Tahun 2024	
											Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	2					KEUANGAN		1.002.600		370.890	170.363	170.363	100	200.519	370.957	37,00
5	2	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		915.485		336.057	152.982	152.982	100	183.067	336.124	36,72
5	2	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40		16	8	8	100	8	16	40,00
5	2	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	6	3	3	100	4	6	40,00

5	2	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Dokumen	10	5	5	100	4	10	40,00
5	2	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		375	Orang/bulan	75	67	67	100	75	142	37,87
5	2	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375	Orang/bulan	75	67	67	100	75	142	37,87
5	2	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		375	-	217	67	67	100	75	217	57,87
5	02	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		300	Orang	75	67	67	100	75	75	25,00
5	2	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375	Orang	142	67	67	100	75	142	37,87
5	2	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		895.060	-	327.899	148.895	148.895	100	179.004	327.899	36,63
5	2	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	Jenis	14	7	7	100	7	14	18,67
5	2	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.500	Paket	4.325	2.825	2.825	100	1.500	4.325	57,67
5	2	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.960	Paket	322.857	145.665	145.665	100	177.192	322.857	36,44
5	2	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	Dokumen	5	2	2	100	3	5	33,33
5	2	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510	Laporan	698	396	396	100	302	698	46,23

5	2	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40	-	18	10	10	100	8	18	45,00
5	2	01	2	07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12	12				
5	2	01	2	07	6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1	1				
5	2	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40	Unit	18	10	10	100	8	18	45,00
5	2	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.045	-	7.612	3.825	3.825	100	3.787	7.612	39,97
5	2	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18875	Laporan	7.550	3.775	3.775	100	3.775	7.550	40,00
5	2	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170	Laporan	62	50	50	100	12	62	36,47
5	2	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550		220	110	110	100	110	220	40,00
5	2	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Unit	2	1	1	100	1	2	40,00
5	2	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	35	Unit	14	7	7	100	7	14	40,00

	5	2	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Unit	2	1	1	100	1	2	40,00
	5	2	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	505	Unit	202	101	101	100	101	202	40,00
	5	2	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		86.670	-	34.652	17.289	17.289	100	17.363	34.652	39,98
	5	2	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2.460	-	984	492	492	100	492	984	40,00
	5	2	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00
	5	2	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00
	5	2	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	410	Dokumen	164	82	82	100	82	164	40,00
	5	2	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	410	Dokumen	164	82	82	100	82	164	40,00
	5	2	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	410	Dokumen	164	82	82	100	82	164	40,00
	5	2	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	410	Dokumen	164	82	82	100	82	164	40,00
	5	2	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00

5	2	02	2	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00
5	2	02	2	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30	Dokumen	12	6	6	100	6	12	40,00
5	2	02	2	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	250	Dokumen	100	50	50	100	50	100	40,00
5	2	02	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	250	Dokumen	100	50	50	100	50	100	40,00
5	2	02	2	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran pembiayaan	250	Dokumen	100	50	50	100	50	100	40,00
5	2	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		80.430	-	32.157	16.041	16.041	100	16.116	32.157	39,98
5	2	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	250	Dokumen	100	50	50	100	50	100	40,00
5	2	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50000	Dokumen	20.000	10.000	10.000	100	10000	20.000	40,00
5	2	02	2	02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan	95	Laporan	38	19	19	100	19	38	40,00
5	2	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	125	Dokumen	50	25	25	100	25	50	40,00

	5	2	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1430	Laporan	572	286	286	100	286	572	40,00
	5	2	02	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1500	STS	600	300	300	100	300	600	40,00
	5	2	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	1430	Dokumen	572	286	286	100	286	572	40,00
	5	2	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	25000	Dokumen	10.000	5.000	5.000	100	5000	10.000	40,00

5	2	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600	Orang	225	75	75	100	150	225	37,50
5	2	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		2.260	-	904	452	452	100	452	904	40,00
5	2	02	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85	Laporan	34	17	17	100	17	34	40,00
5	2	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan	2	1	1	100	1	2	40,00
5	2	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00
5	2	02	2	03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00
5	2	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	4	2	2	100	2	4	40,00

5	2	02	2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2140	Orang	856	428	428	100	428	856	40,00
5	2	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.140	-	455	228	228	100	227	455	39,91
5	2	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1090	Jumlah Desa	436	218	218	100	218	436	40,00
5	2	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50	Jumlah kejadian Bencana	19	10	10	100	9	19	38,00
5	2	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	380	-	152	76	76	100	76	152	40,00
5	2	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Aplikasi	2	1	1	100	1	2	40,00
5	2	02	2	05	03	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	375	Orang	150	75	75	100	75	150	40,00
5	2	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		445	-	181	92	92	100	89	181	40,67
5	2	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		445	Dokumen	181	92	92	100	89	181	40,67

	5	2	03	2	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen	2	1	1	100	1	2	40,00
	5	2	03	2	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	5	4	4	100	1	5	100,00
	5	2	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	8	4	4	100	4	8	40,00
	5	2	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	4	2	2	100	2	4	40,00
	5	2	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	2	1	1	100	1	2	40,00
	5	2	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	2	1	1	100	1	2	40,00
	5	2	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	4	2	2	100	2	4	40,00
	5	2	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	2	1	1	100	1	2	40,00
	5	2	03	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	2	1	1	100	1	2	40,00

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SI LOKA	SUMBER DANA	PRIORIT			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						352.576.494.236,00						324.634.044.850,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						352.576.494.236,00							324.634.044.850,00	
	5.02	KEUANGAN						352.576.494.236,00							324.634.044.850,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	-			100 Persent ase	12.392.542.980,00						-	3.193.065.150,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	-			8 Dokume n	16.547.300,00			Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah	-	16.960.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokume n	9.031.550,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		9.307.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	7.515.750,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		7.653.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			67 Orang	8.849.605.280,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	8.839.605.280,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			67 Dokumen	751.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	830.542.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				75 Orang	751.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		830.542.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persentase	1.013.845.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	690.385.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11.553.900,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		11.842.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	145.197.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		148.827.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				177192 Paket	85.810.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		101.792.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokume n	12.498.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		7.498.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				302 Laporan	758.786.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		420.424.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			23 Unit	271.007.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	229.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	271.007.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		229.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.676.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	876.906.250,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		912.054.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			110 Unit	579.755.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Pe	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	462.418.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	302.040.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		265.632.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	151.834.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		67.758.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				101 Unit	83.376.550,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		85.460.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan Penyelenggaraan penatausahaan sesuai ketentuan (Hari Opini BPK RI Penetapan APBD	100 Persen 100 Persen 30-11-2025 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen			100 100 Hari 2 Opini WTP Waktu Tepat Waktu	338.548.019.156,00						100 Persen 100 Persen 30-11-2024 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen	320.430.441.300,00	

	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	-			100 %	2.505.726.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	1.625.266.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	47.333.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		48.516.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	41.772.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		42.815.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD															
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	19.188.60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD															

			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	21.212.40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	39.096.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	24.094.80	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD															

			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	100.077.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		39.814.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1.172.904.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		432.323.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	237.795.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		400.385.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	284.757.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		218.340.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				6 Dokumen	53.222.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		115.088.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen	277.072.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		208.933.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

[illegible]

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	83.844.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		25.697.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				528 Dokumen	75.872.400,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	77.769.40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah															

			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	43.296.30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	33.562.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	34.401.30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)															

			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				8 Laporan	64.324.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	37.243.20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	33.819.10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait															

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5500 Dokumen	48.301.800,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	49.509.30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	947.580.750,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		184.481.400,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Opini BPK RI, Penyampaian laporan keuangan, Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan Jumlah laporan perencanaan keuangan</i>	-			WTP 243 Laporan	1.375.428.000,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	758.309.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				4 Laporan	114.225.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		80.519.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				7 Laporan	511.583.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		506.174.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	111.399.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		111.396.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab</i>				150 Orang	518.959.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pendukung Prioritas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

			an Pemerintah Kabupaten/Kota													
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				26 Lembag a	119.260.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	-		60.219.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Desa yang disalurkan	-			100 Persent ase	332.719.925.45 6,00			Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyeludu pan	Penduk ung Priorita s	Masyarakat	-	316.699.135.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				218 Laporan	326.487.092.65 6,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempe rkua t Reform asi Politik, Hukum, dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa	Penduk ung Priorita s	Masyarakat		310.310.482.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											n Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan					
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10 Laporan	6.232.832.800,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Masyarakat		6.388.653.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase dokumen penatausahaan sesuai aturan</i>	-			100 %	693.453.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	861.512.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				1 Dokumen	472.781.250,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		484.600.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	220.672.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeledupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		376.911.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	80 Persentase			80 Persentase	1.635.932.100,00						80 Persentase	1.010.538.400,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	-			80 Persentase	1.635.932.100,00			-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	1.010.538.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	57.250.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		75.107.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		98.344.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	52.350.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		85.510.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

									, Semua Kel/Desa							
	5.02.03.2.01. 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	220.242.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		206.225.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01. 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	351.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		75.386.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01. 0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		99.469.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01. 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	52.750.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		89.560.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01. 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokume n	211.453.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penduk ung Priorita s	Perangkat Daerah		75.417.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01. 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	195.220.170,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		100.857.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	395.666.230,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		104.659.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							352.576.494.236,00							324.634.044.850,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						355.056.046.378,00							324.634.044.850,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						355.044.492.478,00							324.622.202.150,00	
	5.02	KEUANGAN						355.044.492.478,00							324.622.202.150,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	-			100 Persentase	12.380.989.080,00						-	3.181.222.450,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	-			8 Dokumen	16.547.300,00			-	-	Perangkat Daerah	-	16.960.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	9.031.550,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		9.307.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	7.515.750,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		7.653.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			67 Orang	8.849.605.280,0 0			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				65 0	8.839.605.280,0 0	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD														

[illegible]

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	145.197.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		148.827.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				177192 Paket	85.810.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		101.792.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12.498.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		7.498.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				302 Laporan	758.786.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		420.424.900,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	271.007.100,00			-	-	Perangkat Daerah	-	229.200.000,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	271.007.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		229.200.000,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	910.782.250,00			-	-	Perangkat Daerah	-	951.557.100,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3775 Laporan	25.200.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		39.502.200,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.676.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	876.906.250,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		912.054.900,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			110 Unit	579.755.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	462.418.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.504.600,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		43.567.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	302.040.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		265.632.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	151.834.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		67.758.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				101 Unit	83.376.550,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		85.460.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyelenggaraan penatausahaan sesuai ketentuan (Hari Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai aturan Opini BPK RI Penetapan APBD	100 Persen 100 Persen 30-11-2025 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen			Hari 2 100 100 Opini WTP Waktu Tepat Waktu	341.027.571.298,00						100 Persen 100 Persen 30-11-2024 Tahun 3,50 Persen 0,5 Persen 3 Bulan WTP Opini 2 Hari 100 Persen	320.430.441.300,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	-			100 %	2.505.726.600,00			-	-	Perangkat Daerah	-	1.625.266.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	47.333.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		48.516.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	41.772.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		42.815.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		19.188.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		21.212.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	39.096.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		24.094.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				84 Dokumen	100.077.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		39.814.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	1.172.904.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		432.323.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD															
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	237.795.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		400.385.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran															
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					6 Dokumen	284.757.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		218.340.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					6 Dokumen	53.222.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		115.088.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah															

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen	277.072.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		208.933.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				35 Orang	251.697.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		54.552.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan yang dikeluarkan Persentase OPD dengan dokumen penatausahaan sesuai aturan	-			2 Hari 100 %	1.253.485.550,00			-	-	Perangkat Daerah	-	486.217.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	83.844.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		25.697.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				528 Dokumen	75.872.400,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		77.769.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		43.296.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	33.562.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		34.401.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				8 Laporan	64.324.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		37.243.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		33.819.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5500 Dokumen	48.301.800,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		49.509.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	947.580.750,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		184.481.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.375.428.000,00			-	Pendukung Prioritas	-	-	758.309.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	114.225.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		80.519.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	511.583.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		506.174.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	111.399.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	-		111.396.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	518.959.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				26 Lembaga	119.260.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.219.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	335.199.477.598,00			-	-	Masyarakat	-	316.699.135.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				218 Laporan	328.966.644.798,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		310.310.482.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10 Laporan	6.232.832.800,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		6.388.653.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	220.672.300,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelupan	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		376.911.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	80 Persentase			80 Persentase	1.635.932.100,00						80 Persentase	1.010.538.400,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	-			80 Persentase	1.635.932.100,00			-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah	-	1.010.538.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	57.250.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		75.107.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		98.344.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	52.350.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		85.510.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.03.2.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	220.242.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		206.225.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	351.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		75.386.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		99.469.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	52.750.100,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		89.560.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	211.453.500,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		75.417.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	195.220.170,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		100.857.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	395.666.230,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendukung Prioritas	Perangkat Daerah		104.659.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH